

## Tanpa Oposisi

### ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus  
dari Universitas Monash, Australia



**K**etika seorang pejabat tinggi negara menyangkal terjadinya pemerkosaan massal pada 1998, ia tidak bergurau. Ia tidak mengajak diskusi atau berdebat. Ia sedang memamerkan kekuasaan politik tanpa oposisi. Kekuasaan demikian bebas hambatan. Bebas dari mekanisme *checks and balances* yang biasa diatur dalam pembagian kuasa trias politika.

Bila ia menyangkal kejahatan kemanusiaan mantan Presiden Soeharto dan berkata, "Mana buktinya?", dia tidak bertanya atau meminta bukti. Semoga tak ada yang tergoda buru-buru menyodorkan bukti dan berharap pejabat itu berubah pikiran. Dengan kekuasaan berlimpah, ia tidak perlu peduli sanggahan apa pun. Ada banyak pejabat semacam itu. Andaikan mereka menolak pemahaman matematika  $2+2=4$ , dengan dalih belum ada bukti hukum dari pengadilan RI, tidak usah dibantah.

Ada pejabat yang tidak tahan kritik. Ada yang tak peduli bila dikritik. Mereka bisa obral ucapan konyol apa saja.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

## Tanpa Oposisi

(Sambungan dari halaman 1)

Kasus yang dibahas bisa berubah-ubah. Yang lampau soal Mei 1998, RUU TNI, dan RKUHAP. Kini soal bencana di Sumatera. Besok entah apa lagi.

Jangan terpaku pada fakta kasusnya. Yang lebih layak disimak: apa yang memungkinkan kekuasaan elite nyaris bebas hambatan. Tanpa oposisi. Bagaimana suatu pemerintahan bebas menciptakan versi kebenaran semau-mau sendiri dan mengabaikan fakta apa pun?

Pemerintahan Orde Baru bebas menyatakan apa saja. Mereka menuduh Sukarno terlibat kudeta untuk menjatuhkan pemerintahannya sendiri. Kampanye antikomunis dilancarkan dengan tuduhan PKI menjadi dalang kudeta G30S. Mempertanyakan kebenaran kampanye itu dengan bukti fakta atau logika macam apa pun bukan hanya sia-sia. Yang meragukan sejarah resmi malah berisiko ditahan atau dibunuh karena dianggap membela PKI.

Bagaimana kejahatan kemanusiaan bisa dilakukan bebas hambatan dan pelakunya menikmati impunitas berpuluh tahun? Malahan diberi aneka gelar kehormatan! Besarnya kekuasaan Orde Baru dibangun di atas pembantaihan warga sebangsa tanpa dihadang pihak lain. Malah didukung sebagian kelompok di dalam dan luar negeri.

Kejahatan kemanusiaan oleh Orde Baru dibiarkan hingga kini. Bahkan, dimuliakan sebagai kisah kepahlawanan. Sebagai manusia, siapa pun yang menjadi pejabat pasca-Orde Baru pasti tergoda ikut berkuasa sebebas masa Orde Baru dan menikmati impunitas serupa.

Sudah banyak yang melawan warisan sejarah Orde Baru itu. Tapi, perlawanan itu tidak selalu cukup dengan narasi faktual dan logika. Semboyan *no viral no justice* tidak selalu jitu. Ada batasnya. Sesekali kata-kata bisa ikut mengubah sejarah. Kadang-kadang gerakan sosial lebih menentukan. Biasanya dibutuhkan kombinasi keduanya. Kemerdekaan RI tidak dicapai semata-mata dengan pidato proklamasi, tapi juga perang revolusi.

Kekuasaan yang bertumpuk di satu tempat ibarat aliran air yang terhadang, lalu tergenang menjadi sarang penyakit. Mirip tersumbatnya peredaran darah dalam tubuh berpenyakit. Tanpa oposisi, suatu pemerintahan tidak harus peduli, dan tidak akan peduli terhadap kepentingan warganya, kecuali jika kemarahan massa meledak dalam bentuk kekerasan. Setelah berhasil meraup suara terbanyak dalam pemilihan umum, mereka bebas berbuat apa saja tanpa dukungan masyarakat.

Protes dari warga jelata sering ditampik para pejabat dengan dalih recehan: "Biasa. Dalam demokrasi wajar ada yang pro dan kontra". Padahal, dalam demokrasi yang sehat, tidak wajar jika pro dan kontra hanya terjadi di media sosial atau protes jalanan. Dalam demokrasi yang sehat, perdebatan paling keras dan sesekali boikot terjadi dalam parlemen.

Banyak protes jalanan mahasiswa dan buruh yang layak dihargai. Tapi, jasa mereka mirip pertolongan darurat pada kecelakaan. Mereka bukan dokter yang resmi bertugas merawat kesehatan politik negara. Yang bertugas utama menjaga kualitas politik negara itu anggota parlemen dan lembaga peradilan. Mereka sengaja dibayar dan diberi sarana dan wewenang berlimpah untuk berdebat paling keras mewakili kepentingan publik. Debat itu utamanya berlangsung di dalam ruang sidang parlemen dan pengadilan. Bukan celetukan individu anggota parlemen di media sosial atau *talk show* di televisi.

Terlalu banyak yang berujar oposisi dalam parlemen itu bukan budaya Indonesia. Seakan-akan Indonesia itu aslinya berbudaya feudal atau otoriter. Tuduhan tersebut berto-lak-belak dengan basa-basi bahwa pro dan kontra biasa dalam demokrasi. Tuduhan itu juga menyangkal sejarah politik di awal kemerdekaan RI. Hingga akhir 1950-an, perdebatan dan saling boikot dalam parlemen RI merupakan peristiwa yang lazim.

Semua sepakat masyarakat Indonesia itu majemuk. Jadi, mengapa selama lebih dari setengah abad kemajemukan itu sangat langka tampil di sidang parlemen? Suara anggota parlemen hampir selalu seragam ibarat paduan suara di panggung konser. Juga dalam berbagai kasus yang berkali-kali dan bertahun-tahun menyulut amarah masyarakat.

Menjadi oposisi memang tidak mudah. Mengelola suara bangsa yang majemuk membutuhkan kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan kecerdasan. Lebih mudah menjadi politikus yang melacurkan diri. Menjadi penjilat pada siapa pun yang sedang berkuasa, tak peduli seburuk apa pun rekam jejaknya. Tak merasa salah atau malu karena dikerjakan beramai-ramai, demi jatah bagi-bagi rezeki sesama elite.

Masyarakat majemuk akan sehat sejahtera jika kemajemukan itu terwakili dalam tata negara dan tata sosial. Kesehatan politik terawat lewat adu otak dan adu kata secara santun, tapi blak-blakan dengan akal sehat di ruang publik. Potensi konflik fisik diminimalkan. Jika perdebatan keras diharamkan dalam tata negara, politikus hanya bisa memilih menjadi penjilat atau pengkhianat bawah tanah.

Konflik tidak selalu menyenangkan. Tapi, ia bagian integral dalam kehidupan masyarakat majemuk, seperti halnya sampah dalam kehidupan kota. Konflik dan sampah bisa dan perlu dikelola sebaik-baiknya. Jika saluran politik tersumbat, kebijakan sesat dianggap normal. Akibatnya, bencana lingkungan atau ledakan kekerasan massa. Ibarat bisul pecah. Sejarah telah bersaksi, parlemen tanpa oposisi cepat atau lambat akan menyulut kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri konflik.